

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dikatakan belum cukup baik dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut penilaian implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini peneliti lakukan dengan mengacu pada teori Van Metter & Van Horn yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan belum sepenuhnya penerima bantuan BPNT tepat pada sasaran yaitu masyarakat kurang mampu yang memerlukan bantuan dari pemerintah.

2. Sumber daya

Sumber daya manusia atau para pelaksana kebijakan BPNT ini masih perlu diperhatikan agar jumlah pelaksana BPNT sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 yaitu terdapat delapan pelaksana, namun dalam pelaksanaannya sumber daya manusia di Kecamatan Citamiang masih belum memadai untuk menjadikan kebijakan BPNT berjalan dengan lancar. Selain itu sumber dana dalam kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan dengan lancar,

karena masih terdapat banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang pada setiap bulannya tidak menerima dana bantuan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam karakteristik agen pelaksana dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari ketidaktahuan para pelaksana mengenai dasar aturan yang menjadi acuan penyaluran BPNT. Dampak dari ketidaktahuan para pelaksana mengenai aturan tersebut, menimbulkan berbagai penyimpangan pelaksanaan dilapangan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

4. Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap atau kecenderungan para pelaksana sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sikap para pelaksana yang mendukung agar pelaksanaan BPNT dapat tetap dilakukan dan tidak berhenti ditengah jalan. Dampak dari dukungan para pelaksana akan membuat para pelaksana merasa bertanggung jawab akan apa yang menjadi tugasnya.

5. Komunikasi antar instansi terkait

Komunikasi antar instansi yang terkait yaitu Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan kelurahan-kelurahan di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dalam pelaksanaan BPNT belum sesuai dengan tugasnya sebagai tim koordinasi dikarenakan masih terdapat beberapa tugas tim koordinasi yang belum dikerjakan dengan maksimal. Komunikasi yang tidak maksimal dapat menyebabkan masalah yang terjadi dilapangan sulit untuk diselesaikan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi lingkungan masyarakat membantu dalam pelaksanaan bantuan BPNT ini, terutama kondisi sosial dan kondisi ekonomi pada masyarakat. Masyarakat begitu mendukung terhadap pelaksanaan BPNT, jika masyarakat tidak mendukung terhadap program yang dibuat pemerintah, maka tujuan dari dibuatnya program tersebut tidak dapat dicapai. Namun mengenai kondisi politik hanya dapat diketahui pada para pembuat kebijakan bukan para pelaksanaan kebijakan. Faktor lingkungan eksternal menjadi sesuatu yang mendukung agar pelaksanaan dari kebijakan dapat dilaksanakan dengan kondusif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas, ada beberapa saran yang perlu di kemukakan dan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait perihal pelaksanaan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

5.2.1 Saran Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dari teori lain selain dari teori Van Metter & Van Horn untuk menggali informasi lebih mendalam dari sudut pandang teori lain. Serta selain itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai strategi agar kebijakan BPNT dapat berjalan dengan lebih baik.

5.2.2 Saran Praktis

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maka saran peneliti untuk pelaksanaannya di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yaitu

- a. Agar tidak terjadi ketidak tepat sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maka para pelaksana kebijakan BPNT harus melakukan verifikasi data penerima BPNT, hal ini dilakukan agar semua penerima BPNT sudah sesuai dengan prosedur yang telah dibuat yaitu penerima harus memenuhi 14 kriteria. Selain itu verifikasi data dilakukan agar selisih antara jumlah SK Direktorat penerima BPNT dengan jumlah penerima yang terealisasi dapat dialokasikan pada penerima baru yang sudah memenuhi 14 kriteria.
- b. Harus adanya penambahan sumber daya manusia yang kompeten dan bisa bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya yang menangani pendistribusian BPNT, hal ini dilakukan agar pelaksanaan BPNT lebih efektif dan efisien . Selain itu harus adanya koordinasi dan evaluasi mengenai dana BPNT agar tidak terjadi lagi permasalahan terdapat KPM yang tidak menerima bantuan BPNT sehingga tidak bisa menukar uang yang berada dalam kartu kombo dengan bahan bantuan.
- c. Harus dilakukannya sosialisasi terhadap aturan dasar kebijakan BPNT pada para pelaksana kebijakan agar para pelaksana mengetahui seperti apa

prosedur pelaksanaan BPNT yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

- d. Perlu adanya komunikasi yang dilakukan antara Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan para pelaksana di kecamatan dan kelurahan, bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara membuat jadwal rutin rapat koordinasi dengan agenda untuk membahas pelaksanaan BPNT yang dilakukan dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi.